

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris sehingga usaha di bidang agraria merupakan kegiatan perekonomian yang dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan baik dari komoditasnya maupun dari segi perekonomiannya. Resiko-resiko usaha pertanian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan jumlah resiko pertanian. Dibutuhkan adanya perlindungan khusus sebagai sarana pengalihan resiko usahatan, sehingga keberadaan asuransi memberikan perlindungan bagi petani dari resiko-resiko usaha pertanian (Liskari, dkk.2016).

Dalam kebijakan dasar dan Pedoman Umum Program Asuransi Pertanian disebutkan bahwa visi program asuransi pertanian adalah menjadikan asuransi sebagai skim perlindungan terhadap resiko gagal panen atau resiko usaha pertanian/peternakan lainnya menuju usaha pertanian/peternakan modern yang berwawasan agribisnis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Demikian juga dengan Indonesia, salah satu sektor yang cukup rentan akibat variabilitas dan perubahan iklim adalah sektor pertanian, khususnya usahatani berbasis padi. Karena usahatani padi sebagai pemasok utama kebutuhan pangan di Indonesia, goncangan terhadap usahatani akibat kejadian iklim ekstrim berupa banjir dan kekeringan akan berdampak besar terhadap ketahanan pangan (Ditjen PSP, 2016)

Padi merupakan bahan makanan menghasilkan beras. Bahan makanan ini merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Meskipun padi dapat digantikan oleh bahan makanan lainnya, namun padi memiliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa makan nasi dan tidak dapat mudah digantikan oleh bahan makanan yang lain.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan curah hujan, kenaikan muka air laut, dan suhu udara, serta peningkatan kejadian iklim ekstrim berupa banjir dan kekeringan merupakan dampak serius perubahan iklim yang dihadapi Indonesia.

Menurut Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana Pertanian Asuransi pertanian ditawarkan sebagai skema peralihan pendanaan yang berkaitan dengan pengalihan resiko pada kegiatan usahatani. Uji coba pelaksanaan asuransi pertanian di Indonesia telah diterapkan sesuai undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pasal 37 ayat (1) yang berbunyi:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian. Asuransi pertanian dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat: i) bencana alam. ii) serangan organisme pengganggu tumbuhan. iii) wabah penyakit hewan menular. iv) dampak perubahan iklim, dan/atau. v) jenis resiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.”

Menurut Dinas Pertanian DIY, Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang sudah menerapkan Asuransi Usaha Tani Padi, salah satunya berada

di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang mendapatkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada tahun 2015. Menurut informasi yang didapat dari Dinas Pertanian Kulon Progo, Kecamatan Wates mempunyai partisipasi cukup baik dibandingkan kecamatan lain. Ada beberapa Kelompok Tani yang beranggotakan paling banyak dibanding kelompok lain. Terkait dengan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada Kelompok Tani Padi Ngesti Utomo 1 Kecamatan Wates Kulon Progo.

B. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pengelolaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Wates Kabupaten KulonProgo.
2. Mengetahui penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Wates Kabupaten KulonProgo.

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengembangan asuransi pertanian, dalam hal penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis, kalangan mahasiswa Fakultas Pertanian, akademisi dan bisnis, dan masyarakat pada umumnya, mengenai asuransi pertanian di Indonesia.